

**Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan  
*Civic Tech Skills* untuk Partisipasi Politik Digital**  
*Citizenship Education in Developing Civic Tech Skills for Digital Political  
Participation*

**Ahmad Muhamad Mustain Nasoha**

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id)

**Shafira Aulia Putri**

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [putriiishafira111@gmail.com](mailto:putriiishafira111@gmail.com)

**Meifta Dian Safitri**

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: [meiftadiansafitri07@gmail.com](mailto:meiftadiansafitri07@gmail.com)

**Article Info**

Received : 30 September 2025  
Revised : 15 October 2025  
Accepted : 20 October 2025  
Published : 25 October 2025

**Keywords:** Civic Education, Civic  
Tech Skills, Digital  
Political Participation,  
Social Media

**Kata kunci:** Pendidikan  
Kewarganegaraan, Civic  
Tech Skills, Partisipasi  
Politik Digital, Media  
Sosial

**Abstract**

*The advancement of digital technology has brought significant changes to the patterns of political participation in society. In this context, Civic Education (PKn) plays an essential role in fostering civic technology skills (Civic Tech Skills) to enable citizens to participate actively and responsibly in digital spaces. This study employs a qualitative approach by analyzing various literature sources and relevant social phenomena. The findings show that Civic Education not only provides political knowledge but also nurtures critical thinking, democratic values, and practical skills for digital interaction, particularly through social media. By integrating civic values with technological utilization, this education helps the younger generation express their aspirations, engage in political discussions, and contribute to building an inclusive and adaptive society in response to contemporary developments. Therefore, Civic Education serves as a vital means of shaping digital citizens who are intelligent, ethical, and ready to face the challenges of democracy in the digital era.*

**Abstrak**

Kemajuan teknologi digital membawa perubahan besar terhadap pola partisipasi politik masyarakat. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam menanamkan keterampilan teknologi kewarganegaraan (Civic Tech Skills) agar warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab di ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah berbagai sumber pustaka dan fenomena

sosial yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn tidak hanya memberikan pengetahuan politik, tetapi juga menumbuhkan sikap kritis, nilai-nilai demokratis, dan kemampuan praktis untuk berinteraksi di ruang digital, khususnya melalui media sosial. Melalui integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dengan pemanfaatan teknologi, pendidikan ini membantu generasi muda dalam menyalurkan aspirasi, berdiskusi mengenai isu politik, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, PKn menjadi sarana penting dalam membentuk warga negara digital yang cerdas, beretika, dan siap menghadapi tantangan demokrasi di era digital.

**How to cite:** Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Shafira Aulia Putri, Meifta Dian Safitri. "Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Civic Tech Skills untuk Partisipasi Politik Digital", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 598-612. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

**Copyright:** 2025, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Shafira Aulia Putri, Meifta Dian Safitri



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN

Era digital dapat diartikan sebagai peralihan dari ekonomi industri menuju ekonomi berbasis informasi, dimana teknologi informasi dan komunikasi menjadi kekuatan utama dibalik perubahan tersebut. Dampaknya tidak merata di seluruh masyarakat, menciptakan kesenjangan digital yang memengaruhi beberapa kelompok sosial. Di era ini, teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah membentuk cara berpikir, norma, serta nilai-nilai masyarakat. Perubahan ini membawa dinamika baru berupa pergeseran cara berkomunikasi, meningkatnya kemudahan akses informasi, serta terbentuknya ekosistem digital yang semakin kompleks. Kemampuan untuk terhubung secara instan, menyampaikan pendapat, dan memperoleh informasi secara cepat telah memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir, kehidupan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat (Muhamad Mustain Nasoha et al., n.d.).

Salah satunya, perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai hal dalam kehidupan masyarakat, termasuk di bidang politik dan kewarganegaraan. Di era digital, partisipasi politik tidak lagi terbatas pada ruang fisik seperti pemungutan suara atau rapat warga, melainkan telah bergeser ke ruang digital. Salah satu tanda perkembangan teknologi di era digital yakni munculnya media sosial yang membuka peluang bagi warga negara untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan politik negara. Fenomena ini disebut sebagai partisipasi politik digital, yaitu keterlibatan warga dalam aktivitas politik melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan warga negara untuk memanfaatkan teknologi secara kritis, etis, dan bermanfaat inilah yang disebut sebagai *Civic Tech Skills*.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu pilar dalam membentuk sikap dan kesadaran kewarganegaraan memiliki peran penting

dalam mengembangkan Civic Tech Skills. Dengan pendekatan yang menanamkan nilai demokrasi, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif, PKn mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap realitas sosial di sekitarnya. Berpikir kritis sendiri dapat diartikan sebagai salah satu elemen berpikir kritis yang unsurnya meliputi melakukan identifikasi, menggambarkan dan menjelaskan, melakukan evaluasi, tuntutan kemampuan berpendapat, kemampuan mempertahankan pendapat dan kemampuan mendengar (*Pengembangan Berpikir Kritis Dalam Pembe* (1), n.d.).

Selain itu, integrasi nilai-nilai kebangsaan dan penguatan karakter melalui pembelajaran kontekstual terbukti efektif dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang lebih mendalam. Dengan menggabungkan pendidikan kewarganegaraan dan literasi digital, diharapkan muncul warga negara digital yang bisa menggunakan teknologi untuk berpartisipasi, mengawasi kebijakan publik, serta memperjuangkan kepentingan bersama secara konstruktif. Pendidikan Kewarganegaraan memanfaatkan teknologi untuk mendukung partisipasi aktif. Siswa dapat menggunakan media sosial, platform online, atau alat-alat digital lainnya untuk menyuarakan pendapat mereka, membagikan informasi, dan terlibat dalam diskusi daring. Teknologi memberikan akses lebih luas kepada informasi dan memungkinkan siswa untuk terlibat dalam isu-isu yang relevan secara global (Mokoginta et al., 2025).

Di tengah era informasi yang cepat berubah, tantangan utama dalam pendidikan kewarganegaraan adalah bagaimana menyesuaikan pendekatan belajar agar sesuai dengan kebutuhan di era digital yang membutuhkan keterampilan berpikir kritis, kerja sama, dan kemampuan menggunakan teknologi. Media sosial, situs berita online, dan platform digital lainnya menjadi sumber utama informasi politik, yang berpotensi memengaruhi proses sosialisasi politik. Pada satu sisi, era digital membuka pintu bagi akses yang lebih luas terhadap berbagai pandangan politik dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi politik. Partisipasi aktif dalam diskusi politik dapat berupa keterlibatan warga negara secara sadar, sukarela, dan kritis dalam pembahasan isu-isu politik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Bentuk partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan demokratis.

Tanpa keterampilan tersebut, partisipasi politik digital bisa jadi hanya aktivitas semu yang tidak menghasilkan perubahan nyata bagi proses demokrasi. Oleh karena itu, memperkuat Civic Tech Skills melalui PKn menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa partisipasi warga di ruang digital tetap didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, etika publik, dan tanggung jawab sosial. Menurut Muh. Zainul Arifin (2023), nilai-nilai kebangsaan merujuk pada nilai-nilai yang terkait dengan identitas bangsa Indonesia. Saat ini, nilai-nilai tersebut tercermin dalam pendidikan karakter bangsa yang didasarkan pada kearifan lokal yang sesuai dengan budaya bangsa (Arifin, 2023).

Selain itu, tidak kalah pentingnya untuk memahami bagaimana generasi muda mengasimilasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks digital ini,

karena mereka adalah pemimpin masa depan yang akan membentuk arah politik dan sosial masyarakat. Generasi muda menjadi kekuatan utama dalam membawa perubahan serta menentukan ke mana arah kehidupan politik dan sosial masyarakat akan berjalan di masa depan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teori sosialisasi politik beroperasi dalam era digital, kita dapat mengembangkan pendekatan pendidikan yang lebih efektif dan relevan untuk mempersiapkan warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab (Ardiani et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam pengembangan Civic Tech Skills guna mendorong partisipasi politik digital secara bermakna. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kurikulum PKn yang sesuai dengan tuntutan era digital serta mendorong munculnya generasi warga negara yang cerdas, kritis, dan mampu menggunakan teknologi untuk kehidupan demokratis.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat fenomenologis dan berfokus pada penguraian (describing) serta pemahaman (understanding) terhadap gejala sosial yang diamati (Nur Hikmatul Auliya et al., n.d.). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengembangkan Civic Tech Skills masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik digital.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek secara langsung dalam konteks yang alamiah. Sejalan dengan pendapat Moleong (2019), penelitian kualitatif berfungsi untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, bukan sekadar mengukur hubungan antar variabel.

Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku yang dapat diamati, serta diarahkan pada konteks latar dan individu secara menyeluruh. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni metode penelitian yang mengandalkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, manuskrip, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan fokus kajian (PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN ANTASARI PRESS BANJARMASIN 2011, n.d.).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik agar seseorang tersebut mempunyai pengetahuan politik dan

kemampuan mengambil keputusan politik dengan cara yang wajar dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Menurut Soedijarto dalam Budiutomo (2013) "Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik menjadi warga negara yang matang secara politik dan turut serta membangun sistem politik yang demokratis."

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan agar menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab, mampu menghadapi permasalahan nasional dan berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (1-7-48-Defry+Ezaa, n.d.).

Pendekatan kontekstual menjadi kunci dalam pembelajaran PKn, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi isu-isu kewarganegaraan yang relevan dengan realitas lokal, nasional, dan global. Ini membantu mereka memahami bahwa kewarganegaraan bukan hanya konsep teoritis, melainkan praktik yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, diperlukan prinsip-prinsip Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi:

1. Kebebasan dan Keterbukaan

Kebebasan dan keterbukaan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam membentuk masyarakat demokratis dan bertanggung jawab. Dalam konteks PKn, kebebasan dan keterbukaan mencakup berbagai aspek, dan prinsip ini memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku warga negara.

Kebebasan dalam PKn mengacu pada hak-hak asasi manusia yang melibatkan kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan berekspresi. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menyediakan pengetahuan tentang sistem politik dan hukum, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan bernegosiasi (Strategi Literasi Politik-1, n.d.).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip kebebasan dan keterbukaan dalam PKn, diharapkan masyarakat dapat melahirkan warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban, serta siap untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Kebebasan dan keterbukaan bukan hanya nilai-nilai yang harus diajarkan, tetapi juga sikap dan perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan demokratis (Nazmi et al., n.d.).

2. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif merujuk pada keterlibatan aktif individu dalam kehidupan masyarakat, politik, dan sosial. Partisipasi aktif bukan sekadar konsep, melainkan sebuah sikap dan perilaku yang harus diterapkan dalam



kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang demokratis dan dinamis (Penelitian et al., 2020).

Yusriati & Amrizal menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang mendukung partisipasi aktif, seperti kemampuan berpikir kritis, kemauan untuk mendengarkan pandangan orang lain, serta kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi (Model et al., n.d.).

Pendidikan Kewarganegaraan juga memanfaatkan teknologi untuk mendukung partisipasi aktif. Siswa dapat menggunakan media sosial, platform online, atau alat-alat digital lainnya untuk menyuarakan pendapat mereka, membagikan informasi, dan terlibat dalam diskusi daring. Teknologi memberikan akses lebih luas kepada informasi dan memungkinkan siswa untuk terlibat dalam isu-isu yang relevan secara global (Mokoginta et al., 2025).

Dengan menerapkan prinsip partisipasi aktif dalam PKn, diharapkan siswa tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tentang kewarganegaraan, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang memungkinkan mereka menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat.

### 3. Kritis dan Analitis

Prinsip kritis dan analitis dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis pada peserta didik. Berbeda dengan pendekatan yang bersifat pasif, prinsip ini menekankan perlunya siswa untuk tidak hanya menerima informasi secara sekadar, melainkan untuk mempertanyakan, menganalisis, dan menyelidiki secara mendalam (Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara bagi Siswa et al., n.d.).

Kritis dan analitis tidak hanya mencakup pemahaman terhadap isu-isu kewarganegaraan, tetapi juga penerapan pemikiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajarkan untuk mengenali berbagai perspektif, menilai argumen, dan merumuskan pendapat pribadi yang didukung oleh bukti atau argumen yang logis. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat membentuk sikap kritis yang melibatkan evaluasi terhadap informasi, pertimbangan etika, dan pemahaman dampak keputusan yang diambil (Eggi Trywandi et al., 2023).

Dengan mengutamakan prinsip kritis dan analitis, PKn berperan dalam membentuk individu yang bukan hanya konsumen pasif informasi tetapi juga produsen pengetahuan yang mampu mengevaluasi, merancang solusi, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

### 4. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang menggarisbawahi pentingnya pengembangan sikap dan perilaku tanggung jawab sebagai bagian integral dari kewarganegaraan yang berkualitas. Prinsip ini tidak hanya mencakup tanggung jawab terhadap diri sendiri, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat, negara, dan dunia yang lebih luas (Educatus: Jurnal Pendidikan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITALISASI 5.0: MEMBENTUK KARAKTER SISWA DI SEKOLAH DASAR Saryono, n.d.).

Bertanggung jawab juga tercermin dalam sikap etis dan moral siswa. Mereka diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan rasa hormat terhadap hak-hak orang lain. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk karakter yang tidak hanya unggul dari segi akademis tetapi juga memiliki integritas pribadi yang tinggi (SKRIPSI WASINGATUR ROHMAH - 1901011168 - PAI, n.d.).

Dengan menerapkan prinsip bertanggung jawab dalam PKn, diharapkan siswa tidak hanya tumbuh sebagai individu yang cerdas secara akademis tetapi juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan siap untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya tanggung jawab dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

### 3.2. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk karakter dan identitas kebangsaan, mengajarkan hak dan kewajiban warga negara, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan identitas kebangsaan (Ashfiya Nur Atqiya et al., 2024).

Pendidikan Pancasila harus ditekankan sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan, yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga menanamkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan yang holistik, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Muhammad et al., 2024).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan utama untuk mendewasakan warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana menjadi warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan memiliki rasa kebangsaan cinta tanah air. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi yang memiliki rasa kebangsaan cinta tanah air, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai warga negara (1-7-48-Defry+Ezaa, n.d.).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki manfaat yang signifikan dalam membentuk karakter siswa dan masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat yang terlihat dari sumber-sumber yang diberikan:

#### 1. Membentuk Generasi Bangsa

Pendidikan kewarganegaraan membantu membentuk generasi bangsa yang memiliki visi dan misi untuk mengetahui dan memahami cita-cita dan tujuan

bangsa. Hal ini memungkinkan siswa untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia.

#### 2. Pendidikan Demokrasi

Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi membantu mahasiswa memahami prinsip-prinsip hak-hak dan kewajiban warga negara, serta sistem pemerintahan. Hal ini membantu menciptakan warga negara yang lebih terinformasi dan terlibat dalam proses demokratis.

#### 3. Pemahaman Isu- isu Global

Pengajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi membantu mahasiswa memahami isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, perdagangan internasional, dan konflik antarbangsa. Hal ini penting meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan global dalam konteks globalisasi dan interkoneksi dunia.

#### 4. Pemahaman Hak Asasi Manusia

Pendidikan kewarganegaraan membantu mahasiswa memahami hak asasi manusia, etika, dan keadilan sosial. Hal ini menciptakan individu yang lebih peduli terhadap hak-hak manusia dan perjuangan untuk keadilan.

#### 5. Persiapan untuk Keterlibatan Aktif

Pengajaran kewarganegaraan mempersiapkan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam masyarakat, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak-hak asasi manusia dan kemampuan mendukung hak-hak.

#### 6. Identitas Kewarganegaraan yang Kuat

Pendidikan kewarganegaraan membantu membentuk identitas kewarganegaraan yang kuat di tengah beragamnya budaya, bahasa, dan agama di Indonesia. Hal ini memungkinkan siswa untuk menjadi warga negara yang berpendidikan, bertanggung jawab, dan berkomitmen pada pembangunan bangsa.

### 3.3. Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era digital

Era Society 5.0, sebagai evolusi dari paradigma Industri 4.0, menandai sebuah pergeseran yang fundamental dalam hubungan manusia dengan teknologi. Society 5.0 tidak sekadar menekankan pada digitalisasi semata, tetapi lebih pada integrasi teknologi ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Konsep ini menekankan pentingnya menghadapi transformasi digital dengan memperhatikan dampaknya yang menyeluruh bagi masyarakat (Alamin et al., 2022).

Pada prinsipnya, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pembelajaran pengembangan kepribadian di segala jenjang pendidikan membekali generasi muda tiga kemampuan atau kompetensi dalam upaya untuk mempersiapkan pelajar supaya mampu bersaing di Era Society 5.0. Kemampuan tersebut yaitu a) Civic Knowledge yaitu berkaitan dengan pengetahuan generasi muda khususnya hak dan kewajiban sebagai warga negara, b) Civic Skill yaitu berkaitan dengan keterampilan dan kecakapan dalam mengimplementasikan pengetahuan sebagai warga negara yang baik,



serta c) Civic Disposition yaitu berkaitan dengan kepribadian atau karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ketiga kemampuan tersebut merupakan nilai yang sangat penting bagi setiap individu.

Pembelajaran dari Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran di segala jenjang pendidikan yang sangat berperan penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia khususnya dalam membangun karakter generasi muda. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membekali pengetahuan saja tetapi juga membekali kecakapan atau keterampilan dan karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam Pancasila sudah terangkum karakter-karakter yang sesuai dengan bangsa Indonesia, dengan begitu Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan salah satu instrumen pembentuk karakter bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi pembelajaran yang dapat menjadi pedoman dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menghadapi Era Society 5.0 yang akan datang sehingga Indonesia tidak akan kalah dalam bersaing dengan negara-negara lain (Kirani & Najicha, 2022).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa transformasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di era digital merupakan bentuk perubahan paradigma dan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi serta dinamika kehidupan kewargaan modern yang kini juga berlangsung di ruang digital. Perubahan ini mencakup pergeseran orientasi tujuan, metode, dan kompetensi kewarganegaraan dari model tradisional menuju arah yang lebih inovatif, partisipatif, dan berlandaskan pemanfaatan teknologi.

### **3.4. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan *Civic Tech***

Istilah "Civic Tech" digunakan untuk merujuk pada produk-produk sipil seperti aplikasi web, portal sipil, dan repositori data terbuka, di antara alat-alat lain- yang memanfaatkan kota pintar dan data pemerintah dan membuat data tersebut tersedia untuk konsumsi publik. Civic Tech berfokus pada menginformasikan warga negara, menghubungkan mereka satu sama lain, dan mendorong mereka untuk terlibat dengan pemerintah mereka untuk bekerja sama demi kebaikan publik. Civic Tech menekankan perlunya kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, termasuk warga yang belum menguasai teknologi, serta para pengembang perangkat lunak. (Yoshida & Thammetar, 2021).

Civic skills atau keterampilan kewarganegaraan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang warga negara setelah seseorang tersebut memiliki pengetahuan tentang menjadi warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizens). Dapat dilihat bahwa civic skills diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sipil dan politik, hal ini merupakan bagian integral dari banyak konsep partisipasi politik.

Menurut CCE, terdapat dua kategori dalam civic skills, yaitu keterampilan berpikir kritis (critical thinking skills) dan keterampilan

partisipasi (participation skills). Keterampilan berpikir kritis diantaranya adalah mampu mengumpulkan dan menilai sebuah informasi, mengklarifikasi dan memprioritaskan informasi, mengidentifikasi dan menilai sebuah konsekuensi, mampu mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan dalam keterampilan partisipasi mampu berkomunikasi, bernegosiasi, bekerja sama, mengatasi konflik secara damai dan adil, memenuhi suatu kesepakatan (Febrianti et al., n.d.).

Dari pengertian “Civic Tech” dan “Civic Skills,” dapat ditarik kesimpulan bahwa Civic Tech Skills adalah keterampilan kewarganegaraan yang dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi digital. Dengan hal ini Pendidikan Kewarganegaraan mendukung pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan Civic Tech Skills. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Civic Tech Skills untuk membentuk warga negara yang cerdas secara politik dan beretika, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berikut ini peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan Civic Tech Skills.

### **3.5. Civic Tech Skills dalam Mendukung Partisipasi Politik Digital Melalui Media Sosial**

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga negara biasa untuk memengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah serta ikut serta dalam menentukan kepemimpinan pemerintahan. Partisipasi politik diartikan sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya penguatan Pancasila dalam hukum tata negara. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap implementasi hukum. Salah satu bentuk partisipasi yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan lembaga-lembaga sosial, seperti organisasi masyarakat sipil, yang berperan dalam advokasi dan pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila (Muhammad et al., 2024).

Pasal 28E ayat (3) menegaskan hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak ini mencakup partisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif, serta keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan politik. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan salah satu prinsip dasar dari demokrasi, yang memungkinkan warga negara untuk terlibat secara langsung dalam proses politik dan pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pasal 1 28C ayat (2) menambahkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat dan negara, hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan publik, termasuk dalam bidang sosial dan politik (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., 2024).

Saat ini, kita hidup di era di mana media sosial dan teknologi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial

memungkinkan kita terhubung dengan orang lain yang berada jauh secara geografis, kita dapat menemukan teman baru, dan menjalin relasi dengan dunia luar (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Ihsan Khoirul Anam, et al., 2025).

Di era digital, Generasi Z memainkan peran kunci dalam dinamika ini. Mereka memperoleh informasi politik melalui media sosial, podcast, dan literatur digital, yang membentuk cara mereka berpartisipasi. Penggunaan platform digital telah membuka peluang baru dalam keterlibatan publik yang lebih luas dan inklusif. Ketika Generasi Z secara aktif diikutsertakan dalam diskusi kebijakan, hal ini mendorong terciptanya kebijakan yang lebih mencerminkan kepentingan masyarakat luas serta memperkuat transparansi. Model partisipasi warga dalam kebijakan publik menggarisbawahi pentingnya partisipasi kaum muda dalam proses yang menyentuh langsung kehidupan mereka. Dengan melibatkan mereka, kebijakan menjadi lebih adaptif, inovatif, dan representatif (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Syahril Alfani, et al., 2025).

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam dinamika opini publik dan partisipasi politik di era digital. Beberapa peran tersebut melibatkan perubahan cara orang berkomunikasi, mendapatkan informasi, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Berikut adalah beberapa aspek peran media sosial dalam konteks ini:

#### 1. Penyebaran Informasi Cepat dan Luas

Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas. Informasi politik dapat tersebar dalam hitungan detik, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan berita terkini dan mengikuti perkembangan politik secara real-time.

#### 2. Demokratisasi Informasi

Media sosial memungkinkan orang berbagi pendapat, mendapatkan dukungan, dan menyampaikan aspirasi politik mereka kepada institusi dan pemimpin politik.

#### 3. Interaksi Langsung antara Warga dan Pemimpin Politik

Melalui media sosial, warga dapat berinteraksi langsung dengan pemimpin politik. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas pemimpin dan memungkinkan dialog dua arah antara pemimpin dan warga.

#### 4. Mobilisasi Politik

Media sosial dapat digunakan untuk mengorganisir kampanye politik, memobilisasi massa, dan menggalang dukungan. Gerakan sosial dan politik dapat berkembang pesat melalui hashtag, kampanye online, dan panggilan aksi yang viral.

#### 5. Pengawasan Publik

Masyarakat dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk memantau kinerja pemerintah dan pemimpin politik. Kritik dan respons cepat dari masyarakat dapat menjadi kontrol terhadap tindakan pemerintah (Juleha Juleha et al., 2024).

Dari beberapa aspek di atas, media sosial membantu meningkatkan partisipasi politik di dunia digital. Platform ini memungkinkan warga ikut serta dalam politik, misalnya dengan mendukung kandidat tertentu, menyebarkan informasi kampanye, atau memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, media sosial juga berperan penting dalam membantu generasi muda memahami isu politik dan mendorong mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, media sosial menjadi salah satu alat yang efektif dalam memperkuat demokrasi digital dengan meningkatkan partisipasi politik yang lebih luas, cepat, dan melibatkan berbagai kalangan masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan utama untuk mendewasakan warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana menjadi warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan memiliki rasa kebangsaan cinta tanah air.

Salah satu prinsip utamanya adalah partisipasi aktif, yaitu keterlibatan warga dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan. Partisipasi aktif bukan sekadar konsep, melainkan sebuah sikap dan perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang demokratis dan dinamis. Di era digital, perkembangan teknologi dan media sosial membuka ruang baru bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Media sosial mempermudah akses informasi, penyaluran aspirasi politik, serta menjadi sarana partisipasi kewarganegaraan digital.

Dengan adanya media sosial, generasi muda menjadi lebih mudah, cepat, luas, dan efektif dalam mengakses informasi, mampu menyampaikan aspirasi politik mereka, serta media sosial menjadi wadah partisipasi kewarganegaraan digital.

##### 4.1. Saran

1. Bagi pendidik, perlu mengintegrasikan literasi digital dan *Civic Tech Skills* dalam pembelajaran PKn agar siswa mampu berpartisipasi aktif dan etis di ruang digital.
2. Bagi pemerintah, perlu mendukung penguatan kurikulum kewarganegaraan berbasis teknologi agar selaras dengan tuntutan era digital.
3. Bagi generasi muda, gunakan media sosial secara bijak sebagai sarana partisipasi politik yang kritis, etis, dan bertanggung jawab.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan meneliti implementasi langsung pengembangan *Civic Tech Skills* dalam pendidikan kewarganegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Syahril Alfani, Muhamad Jalaludin, & Solahuddin Dueramae. (2025). Peran Serta Warga Negara dalam Pengambilan Kebijakan Publik. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 42–51. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1600>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hanifah Muslimah, Rana Inas Zahira, & Dina Setiana Pratiwi. (2024). Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional: Penegak Hak Sipil dan Politik di Indonesia. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(5), 153–167. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i5.441>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Ihsan Khoirul Anam, Hesti Arlinda Natasya, & Rizquna Salsabila. (2025). Implementasi Nilai - Nilai Pancasila dalam Penggunaan Media Sosial. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(1), 163–174. <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i1.5063>
- Alamin, Z., Lukman, L., Missouri, R., Annafi, N., Sutriawan, S., & Khairunnas, K. (2022). PENGUATAN DAYA SAING UMKM MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI DI ERA SOCIETY 5.0. *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 112–126. <https://doi.org/10.52266/taroa.v1i2.1235>
- Ardiani, D., Sri Kartini, D., & Ganjar Herdiansyah, A. (2019). STRATEGI SOSIALISASI POLITIK OLEH KPU KABUPATEN NGAWI UNTUK MEMBENTUK PEMILIH PEMULA YANG CERDAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 DI KABUPATEN NGAWI. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Salma Nabila, Mukhamad Diki Indarto, & Tri Wulan Sari. (2024). Kewarganegaraan dan Sistem Pendidikan : Pengaruh Globalisasi Terhadap Kurikulum Kewarganegaraan di Sekolah Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4), 208–220. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1589>
- D. (n.d.). *Universitas Dharmawangsa 500* (Vol. 14).
- Eggi Trywandi, M., Aliffiani, Q., Juliati, P., Qopal Hidayat, M., Muhamad, M. Y., Dwi Nurhaepi, H., Amira, R., Yusuf Suferi, M., Tri Ramdani, F., & Akhmad Munjin, R. (2023). Implementasi Program Pendidikan Politik dalam meningkatkan Pengetahuan Pemilih Pemula. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 5).
- Febrianti, N., Nur, S. M., & Juwita, S. R. (n.d.). *Penguatan Civic Skills Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Partisipasi Mahasiswa Sebagai Warga Negara*.



- Jasmine Najwa Al Khansa, Nissa Agilda Intan Maiyuni, Nadya Intan Azzahroh, Callista Najwah Shandiva, Arninda Nur Aini, dan Imam Ghazali, dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dimuat dalam Jurnal Kewarganegaraan dan Pembangunan Masyarakat (JKEPMAS), Vol. 1, No. 3, DOI: <https://doi.org/10.3342/jkepmas.v1i3.155>
- Juleha Juleha, Jusfira Yuniar, & Nur Riswandi Marsuki. (2024). Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik dan Partisipasi Politik Era Digital. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 38-45. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.951>
- Kirani, A. P., & Najicha, F. U. (2022). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Society 5.0 Mendatang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(2), 767-773. <https://doi.org/10.31949/educatio.v8i2.2391>
- Linton Naibaho, Johan Pardamean Simanjuntak, Yana Sebha Pasaribu, Roselli Anjelina Lumbansiantar, Nelly Moria Hutapea, Ivana Theo Philia, Kania Nova Ramadhani, & Tri Santa Mahulae. (2023d). Peran Mahasiswa PPKN FIS Universitas Negeri Medan Dalam Menghadapi Tantangan Politik 2024, Studi Kasus: Praktek Money Politik. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 15-30. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.728>
- Model, E., Politik, P., Pelaksanaan, D., Pemilu, S., Deli, K., Yusriati, S., & Amrizal, Mokoginta, D., Pomalingo, S., Ismail, R. P., Guru, P., & Dasar, S. (2025). LINGKUNGAN BELAJAR ABAD 21 PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) DI SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 3 TAPA, KABUPATEN BONE BOLANGO. 2(4), 1827-1838. <https://doi.org/10.62335>
- Muhamad Mustain Nasoha, A., Nur Atqiya, A., Dwi Nugraheni, A., Rasyid Ridho, M., & Arifin Aprilianto, M. (n.d.). Digital Pancasila : Strategi Komunikasi dalam Mempromosikan Nilai-Nilai Kebangsaan di Era Media Sosial. 2(3), 137-152. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.274>
- Muhammad, A., Nasoha, M., Keizafa, M., Agachi, Y., Muhammad, R., Apriyandi, M. B., Romadoni, R., & Muhammad, M. R. (2024). *Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara dalam Era Demokrasi Pancasila and Strengthening Constitutional Law in the Democratic Era* (Vol. 1, Issue 2). <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.
- Nazmi, R., Indah Susilowati, Mp., Loso Judijanto Anni Yuliah Jamurin, M. M., Anni Yuliah, M. M., Ajeng Entaresmen Wahyul Furqon, Ms. R., & Johara, Ms. (n.d.). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. [www.buku.sonpedia.com](http://www.buku.sonpedia.com)
- Nugraha, H. S. (2023). Paradigma Etika Digital Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2412-2425. Universitas Langlangbuana. P-ISSN: 1978-0184, E-ISSN: 2723-2328. <https://doi.org/10.1177/2050157917737812>

- Nur Hikmatul Auliya, Ms., Helmina Andriani, G., Roushandy Asri Fardani, Ms., Jumari Ustiawaty, Mp., Evi Fatmi Utami, Ms., Dhika Juliana Sukmana, A., Rahmatul Istiqomah, R., Oleh, D., Pustaka Ilmu Editor, C., & Abadi, H. (n.d.). *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF*. Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara bagi Siswa, D., Iskandar Zulkarnain, A., Fadly Ramadhan Indarto, A., Alief Raihan Ramadhan, M., Alfajri Firdaus, R., & Palangka Raya Corresponding Author, I. (n.d.). Dampak Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara bagi Siswa. In *Journal of Innovative and Creativity* (Vol. 5, Issue 2).
- Penelitian, L., Pengabdian, D., Masyarakat, K., Susanti, E., Monica, D. R., & Santika Firdana, J. (2020). *Sosialisasi Membangun Literasi Karakter Berbasis Pancasila di Era Digital 4.0 dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme pada Remaja* (Vol. 2020, Issue 1). <https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id>
- Putri, F., Andila, K., Anita, N., & Febriyanti, ah. (2025). *Penguatan Civic Engagement Generasi Z melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. 167–176. <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i2.5119>
- Yosaphat Haris Nusantarastriya, H. Sapriya, H. Abdul Azis Wahab, dan H. Dasim Budimansyah, dimuat dalam Jurnal Cakrawala Pendidikan, Edisi November 2013, Tahun XXXII, Nomor 3.
- Yoshida, M., & Thammetar, T. (2021). Education Between GovTech and Civic Tech. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 16(4), 52–68. <https://doi.org/10.3991/ijet.v16i04.18769>